



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 23 Tahun 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Umum untuk digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PEYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran satuan unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 2

- 1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Uraian pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

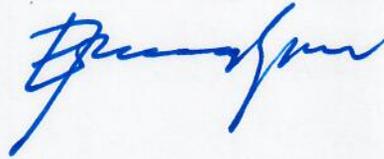
Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 25 Oktober 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 25 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011, NOMOR : 23

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012**

I. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

I. Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- 3) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 4) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
- 5) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahn, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dianggarkan dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.

- 6) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dianggarkan dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- 7) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir, sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 8) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b. Dana Perimbangan

- 1) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada DAU Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2010.
- 2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012 serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2010.
- 3) Alokasi Dana Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- 4) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau untuk Kabupaten Lampung Timur dialokasikan sesuai keputusan gubernur.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Dana bantuan operasional sekolah didasarkan pada alokasi dana bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2011, dengan memperhatikan realisasi dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2010. Selisih lebih atau kurang dana bantuan operasional sekolah ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- 2) Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil tahun anggaran 2010, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2011 ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

II. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Belanja Tidak langsung

1) Belanja Pegawai

- a) Besarannya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2012 serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pangangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2012.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

2) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, karena belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

3) Belanja Bantuan Sosial

- a) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
- b) Belanja bantuan sosial harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial ditetapkan dalam peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

4) Belanja Bagi Hasil

Dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2011. Sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2011 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

5) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan Bupati. Pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti penanggulangan bencana alam, kebutuhan tanggap darurat dan bencana sosial. Penetapan anggaran belanja tidak terduga mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2010.

b. Belanja Langsung

1) Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
- b) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenan, dianggarkan pada jenis belanja dan jasa.
- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dilaksanakan secara selektif dan memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari pelatihan/bimbingan teknis tersebut.

3) Belanja Modal

- a) Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya.
- b) Pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

III. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dihitung berdasarkan perkiraan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2011.

- 2) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- 2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negative, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan volume program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

II. TEKNIS PENYUSUNAN APBD

1) Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

| O | URAIAN | WAKTU | LAMA |
|-----|---|---|----------|
| 1. | Penyusunan RKPD | Akhir bulan Mei | |
| 2. | Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Bupati | Minggu 1 bulan Juni | 1 minggu |
| 3. | Penyampaian KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD | Pertengahan bulan Juni | 6 minggu |
| 4. | KUA dan PPAS disepakati antara Bupati dan DPRD | Akhir bulan Juli | |
| 5. | Surat Edaran Bupati perihal pedoman RKA-SKPD | Awal bulan Agustus | 1 minggu |
| 6. | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD | Awal Agustus sampai dengan akhir September | 7 minggu |
| 7. | Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD | Minggu pertama bulan Oktober | 2 bulan |
| 8. | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati | Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan | |
| 9. | Hasil evaluasi Rancangan APBD | 15 hari kerja (bulan Desember) | |
| 10. | Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | Paling lambat akhir Desember (31 Desember) | |

- 2) RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- 3) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 4) Dalam kolom penjelasan penjabaran APBD diisi lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung.
- 5) Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 harus dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September 2012, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

| NO | URAIAN | WAKTU | LAMA |
|-----|---|---|---------------|
| 1. | Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD | Minggu pertama Agustus | - |
| 2. | Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD | Minggu kedua Agustus | 7 hari |
| 3. | Pedoman penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD | Minggu ketiga Agustus | - |
| 4. | Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD | Minggu kedua September | - |
| 5. | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD | Akhir September (3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir) | - |
| 6. | Penyampaian kepada gubernur untuk dievaluasi | | 3 hari kerja |
| 7. | Keputusan gubernur tentang hasil evaluasi PAPBD kabupaten TA 2012 | Pertengahan Oktober | 15 hari kerja |
| 8. | Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi | Pertengahan Oktober | - |
| 9. | Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi | Minggu ke-3 Oktober | 7 hari kerja |
| 10. | Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan penyempurnaan | Minggu ke-4 Oktober (setelah pemberitahuan untuk penyempurnaan sesuai hasil evaluasi) | 7 hari kerja |

| | | | |
|-----|---|--|--------------|
| 11. | Pencabutan Raperda PAPBD | Minggu ke-1 Nopember | 7 hari kerja |
| 12. | Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan Perubahaan DPA-SKPD | Minggu ke-3 Oktober (setelah PAPBD) | 3 hari kerja |

6) Dalam Perubahan APBD tahun Anggaran 2012, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengganggu kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten pada kelompok belanja tidak langsung apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut tidak cukup waktu sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012.

III. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang bersumber dari PAD.
2. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
3. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar pemerintah daerah menggunakannya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang.
4. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 % (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Penggunaan belanja perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari danya penganggaran yang bersifat "paket". Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan Bupati.
6. Perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD agar perjalanan dinasnya diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
7. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
 - b. Konsolidasi RBA dengan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sampai pada jenis belanja.
 - c. Sistem informasi keuangan untuk BLUD agar dibuat format sendiri.

8. Khusus bagi Rumah sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD.
9. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 dengan kebijakan nasional antara lain :
 - a. Program pencapaian MDGs, seperti : kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamankan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
 - b. Program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia dan pembentukan Komisi Daerah lanjut Usia (Komda Lansia) sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat.
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011.
 - d. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pertauran perundang-undangan lainnya.
 - e. PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian dapat diberikan tunjangan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.
 - f. Rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2012 |
|----|--|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | |
| | 1.1 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | a Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta | Orang/Bulan | 360.000 |
| | b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 Juta | OB | 450.000 |
| | c Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp 500 Juta | OB | 550.000 |
| | d Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp 1 miliar | OB | 600.000 |
| | e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OB | 800.000 |
| | f Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OB | 850.000 |
| | g Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OB | 900.000 |
| | h Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | 1.250.000 |
| | i Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OB | 1.500.000 |
| | j Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OB | 1.700.000 |
| | k Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OB | 2.000.000 |
| | l Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | 2.450.000 |
| | m Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | 2.800.000 |
| | n Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | 3.200.000 |
| | o Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Trilyun | OB | 3.500.000 |
| | p Nilai pagu dana diatas Rp 1 Trilyun | OB | 4.100.000 |
| | 1.2 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN & PPTK | | |
| | a Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta | Orang/Bulan | 300.000 |
| | b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 Juta | OB | 400.000 |
| | c Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp 500 Juta | OB | 450.000 |
| | d Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp 1 miliar | OB | 500.000 |
| | e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OB | 650.000 |
| | f Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OB | 700.000 |
| | g Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OB | 800.000 |
| | h Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | 1.050.000 |
| | i Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OB | 1.250.000 |
| | j Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OB | 1.450.000 |
| | k Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OB | 1.650.000 |
| | l Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | 2.050.000 |
| | m Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | 2.350.000 |
| | n Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | 2.650.000 |
| | o Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Trilyun | OB | 2.950.000 |
| | p Nilai pagu dana diatas Rp 1 Trilyun | OB | 3.500.000 |
| | 1.3 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM | | |
| | a Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta | Orang/Bulan | 285.000 |
| | b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 Juta | OB | 350.000 |
| | c Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp 500 Juta | OB | 400.000 |
| | d Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp 1 miliar | OB | 475.000 |
| | e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OB | 600.000 |
| | f Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OB | 650.000 |
| | g Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OB | 700.000 |
| | h Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | 1.000.000 |
| | i Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OB | 1.200.000 |
| | j Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OB | 1.400.000 |
| | k Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OB | 1.550.000 |
| | l Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | 1.900.000 |
| | m Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | 2.200.000 |
| | n Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | 2.500.000 |
| | o Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Trilyun | OB | 2.800.000 |
| | p Nilai pagu dana diatas Rp 1 Trilyun | OB | 3.300.000 |
| | 1.4 BENDAHARA PENGELUARAN | | |
| | a Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta | Orang/Bulan | 260.000 |
| | b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 Juta | OB | 300.000 |
| | c Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp 500 Juta | OB | 350.000 |
| | d Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp 1 miliar | OB | 450.000 |
| | e Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OB | 550.000 |
| | f Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OB | 600.000 |
| | g Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OB | 650.000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2012 |
|-----|--|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | h Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | 900,000 |
| | i Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OB | 1,050,000 |
| | j Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OB | 1,200,000 |
| | k Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OB | 1,400,000 |
| | l Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | 1,700,000 |
| | m Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | 2,000,000 |
| | n Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | 2,250,000 |
| | o Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Trilyun | OB | 2,500,000 |
| | p Nilai pagu dana diatas Rp 1 Trilyun | OB | 2,900,000 |
| 1.5 | STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta | Orang/Bulan | 200,000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 Juta | OB | 250,000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d Rp 500 Juta | OB | 300,000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp 1 miliar | OB | 350,000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OB | 400,000 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OB | 450,000 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OB | 500,000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | 650,000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OB | 800,000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OB | 900,000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OB | 1,050,000 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | 1,300,000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | 1,500,000 |
| | n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | 1,700,000 |
| | o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Trilyun | OB | 1,850,000 |
| | p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Trilyun | OB | 2,200,000 |
| 2 | HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) | | |
| 2.1 | PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | OB | 365,000 |
| 2.2 | PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) | | |
| | a Nilai pagu pengadaan s.d.Rp. 100 juta | Per Paket | 365,000 |
| | b Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 juta | OP | 550,000 |
| | c Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d Rp 500 juta | OP | 700,000 |
| | d Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OP | 850,000 |
| | e Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OP | 1,050,000 |
| | f Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OP | 1,200,000 |
| | g Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OP | 1,350,000 |
| | h Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | 1,700,000 |
| | i Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | 1,900,000 |
| | j Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | 2,000,000 |
| | k Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | 2,200,000 |
| | l Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | 2,650,000 |
| | m Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | 3,100,000 |
| | n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | 3,500,000 |
| | o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Trilyun | OP | 3,750,000 |
| | p. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Trilyun | OP | 4,000,000 |
| 2.3 | PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) | | |
| | a Nilai pagu pengadaan s.d.Rp. 100 juta | Per Paket | 365,000 |
| | b Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 juta | OP | 500,000 |
| | c Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d Rp 500 juta | OP | 600,000 |
| | d Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OP | 750,000 |
| | e Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OP | 900,000 |
| | f Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OP | 1,050,000 |
| | g Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OP | 1,150,000 |
| | h Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | 1,450,000 |
| | i Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | 1,600,000 |
| | j Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | 1,750,000 |
| | k Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | 1,900,000 |
| | l Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | 2,300,000 |
| | m Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | 2,700,000 |
| | n Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | 3,000,000 |
| | o Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Trilyun | OP | 3,200,000 |
| | p Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Trilyun | OP | 3,400,000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2012 |
|-----|---|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4 | PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta | Per Paket | 365,000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta | OP | 365,000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta | Per Paket | 365,000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta | OP | 400,000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta | OP | 500,000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar | OP | 600,000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar | OP | 750,000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar | OP | 900,000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar | OP | 1,000,000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | 1,200,000 |
| | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | 1,350,000 |
| | l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | 1,450,000 |
| | m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | 1,550,000 |
| | n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | 1,900,000 |
| | o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | 2,200,000 |
| | p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | 2,500,000 |
| | q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OP | 2,700,000 |
| | r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 1 trilyun | OP | 2,850,000 |
| 3 | HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN | | |
| 3.1 | PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/ JASA | OB | 260,000 |
| 3.2 | PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/ JASA | | |
| | a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp 100 juta | OP | 250,000 |
| | b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta | OP | 300,000 |
| | c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | OP | 450,000 |
| | d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OP | 500,000 |
| | e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OP | 600,000 |
| | f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OP | 700,000 |
| | g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OP | 800,000 |
| | h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | 1,000,000 |
| | i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | 1,100,000 |
| | j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | 1,200,000 |
| | k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | 1,300,000 |
| | l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | 1,600,000 |
| | m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | 1,900,000 |
| | n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | 2,100,000 |
| | o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OP | 2,250,000 |
| | p. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 triliun | OP | 2,400,000 |
| 4 | HONORARIUM PENGELOLA PNB | | |
| 4.1 | ATASAN LANGSUNG BENDAHARA | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d.Rp. 100 juta | OB | 300,000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 juta | OB | 400,000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp 500 juta | OB | 450,000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OB | 500,000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 miliar | OB | 650,000 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OB | 700,000 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OB | 800,000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | 1,050,000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OB | 1,250,000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OB | 1,450,000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OB | 1,650,000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2012 |
|----------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | 2,050,000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | 2,350,000 |
| | n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | 2,650,000 |
| | o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OB | 2,950,000 |
| | p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun | OB | 3,500,000 |
| | 4.2 BENDAHARA | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d.Rp. 100 juta | OB | 260,000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 juta | OB | 300,000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp 500 juta | OB | 350,000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OB | 450,000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OB | 550,000 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OB | 600,000 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OB | 650,000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | 900,000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OB | 1,050,000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OB | 1,200,000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OB | 1,400,000 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | 1,700,000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | 2,000,000 |
| | n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | 2,250,000 |
| | o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OB | 2,500,000 |
| | p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun | OB | 2,900,000 |
| | 4.3 ANGGOTA | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d.Rp. 100 juta | OB | 200,000 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp 250 juta | OB | 250,000 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp 500 juta | OB | 300,000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OB | 350,000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OB | 400,000 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OB | 450,000 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OB | 500,000 |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | 650,000 |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OB | 800,000 |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OB | 900,000 |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OB | 1,050,000 |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | 1,300,000 |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | 1,500,000 |
| | n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | 1,700,000 |
| | o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OB | 1,850,000 |
| | p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun | OB | 2,200,000 |
| 5 | HONORARIUM PENELITI | | |
| 5.1 | Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari) | OJ | 50,000 |
| 5.2 | Peneliti Madya (maksimum 4 jam/hari) | OJ | 50,000 |
| 5.3 | Peneliti Muda (maksimum 4 jam/hari) | OJ | 40,000 |
| 5.4 | Peneliti Pertama (maksimum 4 jam/hari) | OJ | 35,000 |
| 5.5 | Peneliti (Non Fungsional Peneliti) | OJ | 30,000 |
| 5.6 | Pembantu peneliti | OJ | 20,000 |
| 5.7 | Koordinator Peneliti | OB | 420,000 |
| 5.8 | Sekretariat Penelitian | OB | 300,000 |
| 5.9 | Pengolah Data | Penelitian | 1,540,000 |
| 5.10 | Petugas Survey | Org/Responden | 8,000 |
| 5.11 | Pembantu Lapangan | OH | 80,000 |
| 6 | HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI /DESEMINASI | | |
| 6.1 | Narasumber/ Pembahas : | | |
| a. | Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | OJ | 1,300,000 |
| b. | Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | OJ | 900,000 |
| c. | Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | OJ | 800,000 |
| 6.2. | Moderator | OJ | 600,000 |
| 7 | HONORARIUM PANITIA SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI | | |
| 7.1. | Penanggungjawab | OK | 400,000 |
| 7.2. | Ketua/Wakil Ketua | OK | 350,000 |
| 7.3. | Sekretaris | OK | 300,000 |
| 7.4 | Anggota | OK | 300,000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2012 |
|------------|---|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI | | |
| 8.1 | SLTA | | |
| 8.2 | Sarjana Muda | OB | 1,750,000 |
| 8.3 | Sarjana | OB | 1,900,000 |
| 8.4 | Master (S.2) | OB | 2,100,000 |
| | | OB | 2,300,000 |
| 9. | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| 9.1 | Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Bupati | | |
| a | Pengarah | | |
| b | Penanggung.g Jawab | OB | 750,000 |
| c | Ketua | OB | 700,000 |
| d | Wakil Ketua | OB | 650,000 |
| e | Sekretaris | OB | 600,000 |
| f | Anggota | OB | 500,000 |
| 9.2 | Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Pengguna Anggaran | | |
| a | Pengarah | | |
| b | Penanggung Jawab | OB | 500,000 |
| c | Ketua | OB | 450,000 |
| d | Wakil Ketua | OB | 400,000 |
| e | Sekretaris | OB | 350,000 |
| f | Anggota | OB | 300,000 |
| 9.3 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | | |
| a | Penanggung Jawab | | |
| b | Ketua | OB | 1,500,000 |
| c | Wakil Ketua | OB | 1,250,000 |
| d | Sekretaris | OB | 750,000 |
| e | Wakil Sekertaris | OB | 750,000 |
| f | Anggota I | OB | 600,000 |
| g | Anggota II | OB | 500,000 |
| f | Anggota III | OB | 375,000 |
| 9.4 | TIM KAJIAN HUKUM/TIM ADVOKASI HUKUM | | |
| a. | Pengarah | | |
| b. | Penanggungjawab | OB | 750,000 |
| c. | Ketua | OB | 700,000 |
| d. | Wakil Ketua | OB | 650,000 |
| e. | Sekertaris | OB | 600,000 |
| f. | Anggota | OB | 500,000 |
| | | OB | 500,000 |
| 9.5 | TIM PANITIA PENGADAAN TANAH | | |
| a. | Ketua | | |
| b. | Wakil Ketua | OB | 1,000,000 |
| c. | Sekertaris | OB | 900,000 |
| d. | Wakil Sekertaris | OB | 800,000 |
| e. | Anggota | OB | 700,000 |
| d. | Sekretariat | OB | 700,000 |
| e. | Satgas | OB | 450,000 |
| 9.6. | Honorarium Biaya Penanganan Kasus | Perkasus | 1,500,000 |
| 10. | HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL | | |
| 10.1 | Penanggung Jawab | | |
| 10.2 | Redaktur | Orang/Ter | 400,000 |
| 10.3 | Penyunting/editor | Orang/Ter | 300,000 |
| 10.4 | Desain Grafis & Fotografer | Orang/Ter | 250,000 |
| 10.5 | Sekretariat | Orang/Ter | 180,000 |
| 10.6 | Pembuat artikel | Orang/Ter | 150,000 |
| | | Halaman | 100,000 |
| 11. | HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH | | |
| 11.1 | Penanggung Jawab | | |
| 11.2 | Redaktur | Orang/Ter | 400,000 |
| 11.3 | Penyunting/editor | Orang/Ter | 300,000 |
| 11.4 | Desain Grafis & Fotografer | Orang/Ter | 250,000 |
| 11.5 | Sekretariat | Orang/Ter | 180,000 |
| 11.6 | Pembuat artikel | Orang/Ter | 150,000 |
| | | Halaman | 80,000 |
| 12 | HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE | | |
| 12.1 | Penanggung Jawab | | |
| 12.2 | Redaktur | OB | 500,000 |
| 12.3 | Editor | OB | 450,000 |
| 12.4 | Web Admin | OB | 400,000 |
| | | OB | 350,000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2012 |
|------------|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 12.5 <i>Web Developer</i> | | |
| | 12.6 Pembuat artikel | OB | 300,000 |
| | 12.7 Penerjemah | Halaman 1500 karakter | 100,000 90,000 |
| 13. | HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI | | |
| | 13.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA | | |
| | a Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milyar | OB | 250,000 |
| | b Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar | OB | 350,000 |
| | c Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 100 milyar | OB | 450,000 |
| | d Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s/d Rp. 200 milyar | OB | 550,000 |
| | e Nilai pagu dana diatas Rp. 200 milyar | OB | 650,000 |
| | 13.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA | | |
| | a Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milyar | OB | 180,000 |
| | b Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar | OB | 260,000 |
| | c Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 100 milyar | OB | 330,000 |
| | d Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s/d Rp. 200 milyar | OB | 400,000 |
| | e Nilai pagu dana diatas Rp. 200 milyar | OB | 470,000 |
| | 13.3 JURU BAYAR/STAF | | |
| | a Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milyar | OB | 150,000 |
| | b Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar | OB | 210,000 |
| | c Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 100 milyar | OB | 270,000 |
| | d Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s/d Rp. 200 milyar | OB | 330,000 |
| | e Nilai pagu dana diatas Rp. 200 milyar | OB | 390,000 |
| 14. | VAKASI PENYELENGGARA UJIAN | | |
| | 14.1 SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR | | |
| | a Penyusunan/pembuatan bahan Ujian | Naskah/Pelajaran | 140,000 |
| | b Pemeriksaan hasil Ujian | Siswa/Mata Ujian | 1,500 |
| | c Pengawas Ujian | OH | 200,000 |
| | 14.2 SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH | | |
| | a Penyusunan/pembuatan bahan Ujian | Naskah/Pelajaran | 150,000 |
| | b Pemeriksaan hasil Ujian | Siswa/Mata Ujian | 1,500 |
| | c Pengawas Ujian | OH | 250,000 |
| | 14.3 SETINGKAT PENDIDIKAN TINGGI | | |
| | a Penyusunan/pembuatan bahan Ujian | Naskah/Pelajaran | 190,000 |
| | b Pemeriksaan hasil Ujian | Siswa/Mata Ujian | 1,500 |
| | c Pengawas Ujian | OH | 200,000 |
| | d. Pengujian pendadaran/Skripsi | Orang/Mahasiswa | 100,000 |
| 15. | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR | | |
| | 15.1 UANG LEMBUR | | |
| | a Golongan I | OJ | 10,000 |
| | b Golongan II | OJ | 13,000 |
| | c Golongan III | OJ | 17,000 |
| | d Golongan IV | OJ | 20,000 |
| | 15.2 UANG MAKAN LEMBUR | | |
| | a. Golongan I dan II | Orang | 25,000 |
| | b. Golongan III | Orang | 27,000 |
| | c. Golongan IV | Orang | 29,000 |
| 16. | SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | | |
| | a. Golongan I dan II | OH | 25,000 |
| | b. Golongan III | OH | 27,000 |
| | c. Golongan IV | OH | 29,000 |
| 17 | SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA | OH | 110,000 |
| 18 | SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL | | |
| | 18.1 Diklat Pimpinan Tk.II | Peserta/angkatan | 30,261,000 |
| | 18.2 Diklat Pimpinan Tk.III | Peserta/angkatan | 22,125,000 |
| | 18.3 Diklat Pimpinan Tk.IV | Peserta/angkatan | 20,230,000 |
| 19 | SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN | | |
| | 19.1 Golongan III | Peserta/angkatan | 5,545,000 |
| | 19.2 Golongan I & II | Peserta/angkatan | 4,470,000 |
| 20 | SATUAN BIAYA KONSUMSI MAKAN DAN SNACK RAPAT | | |
| | a Makan | OK | 27,000 |
| | b Snack | OK | 12,000 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2012 |
|------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan | | |
| 21.1 | Pasien Rumah Sakit | OH | 24,000 |
| 21.2 | Anak Panti Asuhan | OH | 24,000 |
| 21.3 | Rescue Team | OH | 27,000 |
| 22 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS | | |
| 22.1 | Kendaraan Bermotor | | |
| a. | Kendaraan Pejabat Eselon I | Unit/Tahun | 32,710,000 |
| b. | Kendaraan Pejabat Eselon II | Unit/Tahun | 19,780,000 |
| c. | Kendaraan Roda 6 | Unit/Tahun | 20,280,000 |
| d. | Kendaraan Operasional Lapangan (double gardan) | Unit/Tahun | 27,620,000 |
| e. | Kendaraan Roda 4 | Unit/Tahun | 18,470,000 |
| f. | Kendaraan Roda 2 | Unit/Tahun | 3,240,000 |
| g. | Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4 | Unit/Tahun | 40,300,000 |
| h. | Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250cc | Unit/Tahun | 10,800,000 |
| i. | Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin 750 cc atau lebih | Unit/Tahun | 32,000,000 |
| 22.2 | Speedboat | Unit/Tahun | 17,000,000 |
| 23 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR | | |
| 23.1 | Inventaris Kantor | Pegawai/Tahun | 55,000 |
| 23.2 | Personal Komputer | Unit/Tahun | 500,000 |
| 23.3 | Printer | Unit/Tahun | 475,000 |
| 23.4 | AC Split | Unit/Tahun | 420,000 |
| 23.5 | Genset | Unit/Tahun | 5,346,000 |
| 24 | SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/PAKAIAN KERJA | | |
| 24.1 | Pakaian Kerja Dokter | Orang/Stel | 510,000 |
| 24.2 | Pakaian Dinas Pegawai/Perawat | Orang/Stel | 450,000 |
| 24.3 | Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh | Orang/Stel | 330,000 |
| 25 | SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN | | |
| 25.1 | Dari Bahasa Asing ke Indonesia | | |
| a. | Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia | Halaman Jadi | 125,000 |
| b. | Dari Bahasa Jepang | Halaman Jadi | 200,000 |
| c. | Dari Bahasa Mandarin, Belanda | Halaman Jadi | 200,000 |
| d. | Dari Bahasa Perancis, Jerman | Halaman Jadi | 145,000 |
| e. | Dari Bahasa Asing Lainnya | Halaman Jadi | 145,000 |
| 25.2 | Dari Bahasa Indonesia ke Asing | | |
| a. | Bahasa Indonesia ke Inggris | Halaman Jadi | 125,000 |
| b. | Ke Bahasa Jepang | Halaman Jadi | 200,000 |
| c. | Ke Bahasa Mandarin, Belanda | Halaman Jadi | 200,000 |
| d. | Ke Bahasa Perancis, Jerman | Halaman Jadi | 145,000 |
| e. | Ke Bahasa Asing Lainnya | Halaman Jadi | 145,000 |
| 26 | SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU | Pegawai/tahun | 1,200,000 |
| 27 | SATUAN BIAYA PERCETAKAN | | |
| 27.1 | Buku / Formulir dan sebagainya | | |
| a | Folio HVS, 1 muka/2 muka 60 gram | | |
| - | Foto Copy Folio | Lembar | 200 |
| - | Foto Copy Double Folio | Lembar | 300 |
| - | Jild biasa | Buah | 3,500 |
| - | Jilid Cover | Buah | 10,000 |
| - | Cetak Cover | Buah | 10,000 |
| - | Cuci Cetak Film | Lembar | 10,000 |
| - | Spanduk | Buah | 300,000 |
| 27.2 | Leaflet / Brosur | | |
| a | Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka / 2 muka | | |
| - | Oplah 200 - 1000 halaman | Halaman | 4,885 |
| - | Oplah >1000 - 5000 halaman | Halaman | 2,760 |
| - | Oplah >5000 halaman | Halaman | 1,380 |
| 27.3 | Poster (min 75x50 cm2) | | |
| a | Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka | | |
| - | Oplah 200 - 1000 halaman | Halaman | 8,165 |
| - | Oplah >1000 - 5000 halaman | Halaman | 5,400 |
| - | Oplah >5000 halaman | Halaman | 2,875 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2012 |
|----|--|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 27.4 Buletin (min 12 lembar) | | |
| | a Folio HVS, 60 gram | | |
| | - Oplah <= 300 eksemplar | Halaman | 345 |
| | - Oplah > 300 eksemplar | Halaman | 245 |
| | 27.5 Cover Buku (2 warna) | | |
| | - Oplah 100-500 | Halaman | 5,520 |
| | - Oplah > 500 | Halaman | 5,290 |
| | 27.6 Cover Buku (4 warna) | | |
| | - Oplah 100-500 | Halaman | 8,970 |
| | - Oplah > 500 | Halaman | 7,185 |
| 28 | SATUAN BIAYA PENJILIDAN | | |
| | | Eksemplar | 10,000 |
| 29 | SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI | | |
| | 29.1 Sewa Mesin Fotokopi Analog | Bulan/Unit | 3,800,000 |
| | 29.2 Sewa Mesin Fotokopi Digital | Bulan/Unit | 5,000,000 |
| 30 | HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI | OJ | 1,200,000 |
| 31 | SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA | | |
| | 31.1 PROGRAM DIPLOMA I,III DAN DIPLOMA IV/Strata 1 | | |
| | a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional | | |
| | - Diploma I dan Diploma III | OT | 13,900,000 |
| | - Diploma IV dan Strata 1 | OT | 14,800,000 |
| | b. Uang Buku dan Referensi per Tahun | | |
| | - Diploma I | OT | 1,100,000 |
| | - Diploma III | OT | 1,300,000 |
| | - Diploma IV dan Strata 1 | OT | 1,300,000 |
| | c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan & penjiilidan | | |
| | - Diploma IV dan Strata 1 | OT | 4,600,000 |
| | 31.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2 | | |
| | a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional | | |
| | - Strata 2 dan Spesialis 1 | OT | 18,000,000 |
| | - Strata 3 dan Spesialis 2 | OT | 18,500,000 |
| | b. Uang Buku dan Referensi per Tahun | | |
| | - Strata 2 dan Spesialis 1 | OT | 1,300,000 |
| | - Strata 3 dan Spesialis 2 | OT | 1,300,000 |
| | c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan & penjiilidan | | |
| | - Strata 2 dan Spesialis 1 | OT | 7,400,000 |
| | - Strata 3 dan Spesialis 2 | OT | 14,100,000 |

PENJELASAN STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

1. **Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan**

Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a. Dalam hal beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
 - b. Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang.
 - c. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
2. **Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP**
 - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh PA/KPA barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100 juta, untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50 juta.
 - b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh PA/KPA barang/jasa menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
3. **Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
4. **Honorarium Pengelola PNB**

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak. Jumlah anggota pengelola PNB paling banyak 5 (lima) orang.
5. **Honorarium Peneliti**

Honorarium peneliti diberikan kepada pegawai negeri atau non-pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian. Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri adalah kelebihan jam kerja normal atau diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Peneliti yang mendapatkan honorarium tidak berhak mendapatkan uang lembur.
6. **Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi**

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a. berasal dari luar penyelenggara kegiatan
 - b. berasal dari penyelenggara sepanjang peserta kegiatan berasal dari luar penyelenggara kegiatan/masyarakat

- Narasumber yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber
7. **Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi**
Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi sepanjang peserta kegiatan berasal dari luar penyelenggara kegiatan/masyarakat.
 8. **Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri**
Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
 9. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati/KPA
 10. **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekertariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenisnya dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
 11. **Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah**
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
 12. **Honorarium Tim Pengelola Website**
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
 13. **Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai**
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang
 14. **Vakasi Penyelenggara Ujian**
Honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak diberikan untuk penyelenggara ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawasan ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Honorarium penyelenggara pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir. Honorarium penguji pendadaran/skripsi diberikan kepada dosen penguji skripsi.
 15. **Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**
 - a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
 - b. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah.
 - c. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memeperhitungkan pajak penghasilan.
 16. **Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil**
 - a. Uang makan diberikan kepada pegawai negeri berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak per pegawai 22 (duapuluhdua) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memeperhitungkan pajak penghasilan.

- 17. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kota**
Uang transpor diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten atau 5 (lima) km dari batas kota/kabupaten.
Untuk pegawai negeri satuan biaya dapat diberikan sepanjang :
- Tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - Disertai surat tugas;
 - Tidak bersifat rutin.
- 18. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat pengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif diklat pimpinan tersebut.
- 19. Satuan Biaya Latihan Prajabatan**
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi CPNS sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya sudah termasuk observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya prajabatan, satuan biaya dapat pengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif biaya prajabatan tersebut.
Catatan :
Satuan biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- 20. Satuan Biaya Konsumsi Rapat**
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor.
- 21. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan**
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit, anak panti asuhan dan rescue team.
- 22. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas**
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai untuk peruntukannya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan biaya pengurusan STNK.
- 23. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- 24. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Kerja**
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas, pakaian seragam dan/atau kerja resmi.
- Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter.
 - Pakaian dinas pegawai diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. Pakaian perawat diperuntukkan bagi perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dimaksud diberikan 1 (satu) stel per tahun.

- c. Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan PA. Pakaian tersebut dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.

25. **Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan**
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
26. **Satuan Biaya Pergantian Inventaris Lama/Pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru**
Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, minimal untuk 1 (satu) pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
27. **Satuan Biaya Percetakan**
Biaya percetakan yang diberikan untuk menunjang kegiatan.
28. **Satuan Biaya Penjilidan**
Biaya percetakan yang diberikan untuk menunjang kegiatan.
29. **Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi**
Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Biaya tersebut sudah termasuk toner dan biaya perawatan.
30. **Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi**
Honorarium yang diberikan kepada narasumber non-pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.
31. **Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non-gelar Dalam Negeri**
Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata I dan pendidikan pasca sarjana (strata 2 atau strata 3) yang ditanggung oleh pemerintah.

| NO. | PROPINSI | Tingkat A/B/C/D | Tingkat E | Tingkat F |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 355,000 | 345,000 | 340,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 3. | R I A U | 355,000 | 345,000 | 340,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 5. | J A M B I | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 355,000 | 345,000 | 340,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 355,000 | 345,000 | 340,000 |
| 8. | LAMPUNG | 375,000 | 365,000 | 360,000 |
| 9. | BENGKULU | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 11. | BANTEN | 355,000 | 345,000 | 340,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 425,000 | 415,000 | 410,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 525,000 | 515,000 | 510,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 415,000 | 405,000 | 400,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 405,000 | 395,000 | 390,000 |
| 17. | B A L I | 475,000 | 465,000 | 460,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 435,000 | 425,000 | 420,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 415,000 | 405,000 | 400,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 355,000 | 345,000 | 340,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 425,000 | 415,000 | 410,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 25. | GORONTALO | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 355,000 | 345,000 | 340,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 425,000 | 415,000 | 410,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 375,000 | 365,000 | 360,000 |
| 30. | MALUKU | 355,000 | 345,000 | 340,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 365,000 | 355,000 | 350,000 |
| 32. | P A P U A | 575,000 | 565,000 | 560,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 475,000 | 465,000 | 460,000 |

Keterangan :

- Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, dan uang saku
- Uang harian diberikan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45 / PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.05/2008 yaitu :
 - Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I
 - Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
 - Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III;
 - Tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
- Besaran uang saku dalam uang harian, digolongkan sesuai dengan tingkat pegawai/pejabat pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut :
 - Tingkat A/B/C/D : Rp. 115.000,-/hari
 - Tingkat E : Rp. 105.000,-/hari
 - Tingkat F : Rp. 100.000,-/hari
- Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp. 190.000,- dan 130.000,-
- Pejabat dan pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas dapat diberi fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara at coast.

33 SATUAN BIAYA UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA | | | UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI DALAM KOTA | | | UANG SAKU PAKET FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA | | |
|-----|--------------------------|--|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---------|
| | | GOL. II | GOL. III | GOL. IV | GOL. II | GOL. III | GOL. IV | GOL. II | GOL. III | GOL. IV |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 3. | R I A U | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 5. | J A M B I | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 8. | LAMPUNG | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 9. | BENGGULU | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 11. | BANTEN | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 17. | B A L I | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 25. | GORONTALO | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 30. | MALUKU | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 32. | P A P U A | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |

Keterangan :

Uang saku paket fullboard di luar kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor (luar kota)
 Uang saku diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard serta fullday/halfday di dalam kota

Keterangan :

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Paket Full Board
Satuan biaya paket full board disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan (3 kali), rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- b. Paket Full Day
Satuan biaya paket full day disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 2 kali (siang dan malam), rehat kopi dan kudapan (2 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- c. Paket Half Day
Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali (siang), rehat kopi dan kudapan (1 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

Catatan :

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri.
- b. Akomodasi paket full board diatur sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|--|
| Pejabat Eselon II keatas | = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. |
| Pejabat Eselon III kebawah | = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. |
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *full board* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota.
 - 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-KL terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *full board*, dan *uang harian paket full board* di luar kota.
 - 2) Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, terdiri atas : indeks paket pertemuan (*full board/fullday/half day*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran II no 33.
- e. Indeks Satuan Biaya tersebut diatas digunakan untuk kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

34 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | GEDUNG BERTINGKAT | GEDUNG TIDAK BERTINGKAT | HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 130,000 | 93,000 | 10,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 131,000 | 100,000 | 10,000 |
| 3. | R I A U | 137,000 | 102,000 | 10,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 132,000 | 98,000 | 10,000 |
| 5. | J A M B I | 130,000 | 90,000 | 10,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 130,000 | 90,000 | 10,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 137,000 | 90,000 | 10,000 |
| 8. | LAMPUNG | 130,000 | 90,000 | 10,000 |
| 9. | BENGGULU | 130,000 | 90,000 | 10,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 147,000 | 90,000 | 10,000 |
| 11. | BANTEN | 138,000 | 106,000 | 10,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 115,000 | 80,000 | 10,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 115,000 | 80,000 | 10,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 115,000 | 80,000 | 10,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 115,000 | 80,000 | 10,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 115,000 | 80,000 | 10,000 |
| 17. | B A L I | 136,000 | 103,000 | 10,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 131,000 | 93,000 | 10,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 125,000 | 85,000 | 10,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 148,000 | 109,000 | 10,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 148,000 | 94,000 | 10,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 125,000 | 90,000 | 10,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 136,000 | 107,000 | 10,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 129,000 | 95,000 | 10,000 |
| 25. | GORONTALO | 258,000 | 239,000 | 12,900 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 139,000 | 111,000 | 10,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 125,000 | 95,000 | 10,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 125,000 | 95,000 | 10,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 125,000 | 95,000 | 10,000 |
| 30. | MALUKU | 260,000 | 185,000 | 13,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 260,000 | 185,000 | 13,000 |
| 32. | P A P U A | 260,000 | 185,000 | 13,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 301,000 | 283,000 | 14,150 |

Keterangan :

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

35 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | BIAYA TA. 2012 |
|-----|--------------------------|----------------|
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 5,800,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 8,000,000 |
| 3. | R I A U | 5,700,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 5,800,000 |
| 5. | J A M B I | 4,700,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 4,000,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 9,000,000 |
| 8. | LAMPUNG | 8,000,000 |
| 9. | BENGKULU | 4,200,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 6,900,000 |
| 11. | BANTEN | 5,000,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 17,200,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 31,300,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 10,500,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 10,400,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 10,000,000 |
| 17. | B A L I | 7,000,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 6,000,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 4,000,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 4,500,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 4,000,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 4,000,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 7,600,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 4,700,000 |
| 25. | GORONTALO | 5,000,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 6,300,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 7,000,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 5,500,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 6,600,000 |
| 30. | MALUKU | 7,000,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 5,000,000 |
| 32. | P A P U A | 11,000,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 9,100,000 |

Keterangan :

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

36 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | RODA 4 | RODA 6/BUS SEDANG | RODA 6/BUS BESAR |
|-----|--------------------------|---------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 580,000 | 1,400,000 | 3,400,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 680,000 | 2,100,000 | 2,400,000 |
| 3. | R I A U | 640,000 | 1,500,000 | 2,800,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 580,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 5. | J A M B I | 550,000 | 1,700,000 | 2,700,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 610,000 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 640,000 | 1,800,000 | 3,400,000 |
| 8. | LAMPUNG | 470,000 | 1,600,000 | 2,200,000 |
| 9. | BENGKULU | 610,000 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 650,000 | 1,700,000 | 2,100,000 |
| 11. | BANTEN | 800,000 | 1,500,000 | 2,300,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 650,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 670,000 | 1,300,000 | 2,300,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 620,000 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 650,000 | 1,700,000 | 2,300,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 630,000 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| 17. | B A L I | 730,000 | 1,400,000 | 2,000,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 730,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 690,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 630,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 560,000 | 1,700,000 | 2,500,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 580,000 | 2,300,000 | 4,100,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 550,000 | 4,100,000 | 4,900,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 700,000 | 1,800,000 | 2,900,000 |
| 25. | GORONTALO | 620,000 | 1,200,000 | 2,600,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 460,000 | 1,100,000 | 2,500,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 590,000 | 2,100,000 | 2,900,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 420,000 | 1,200,000 | 2,600,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 560,000 | 1,200,000 | 2,600,000 |
| 30. | MALUKU | 610,000 | 1,100,000 | 1,900,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 580,000 | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 32. | P A P U A | 750,000 | 1,300,000 | 2,100,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 660,000 | 1,100,000 | 1,900,000 |

Keterangan :

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidental, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

37 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN PEJABAT

| | | (dalam rupiah) |
|------|--------------------------|----------------|
| NO. | PROPINSI | BIAYA TA 2012 |
| 1 | 2 | 5 |
| 22.1 | Pejabat Eselon I | |
| 22.2 | Pejabat Eselon II | 440,000,000 |
| | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | |
| | SUMATERA UTARA | 306,000,000 |
| | R I A U | 331,000,000 |
| | KEPULAUAN RIAU | 320,000,000 |
| | J A M B I | 309,000,000 |
| | SUMATERA BARAT | 325,000,000 |
| | SUMATERA SELATAN | 328,000,000 |
| | LAMPUNG | 321,000,000 |
| | BENGKULU | 334,000,000 |
| | BANGKA BELITUNG | 320,000,000 |
| | BANTEN | 344,000,000 |
| | JAWA BARAT | 316,000,000 |
| | D. K.I. JAKARTA | 310,000,000 |
| | JAWA TENGAH | 307,000,000 |
| | D.I. YOGYAKARTA | 323,000,000 |
| | JAWA TIMUR | 316,000,000 |
| | B A L I | 319,000,000 |
| | NUSA TENGGARA BARAT | 325,000,000 |
| | NUSA TENGGARA TIMUR | 342,000,000 |
| | KALIMANTAN BARAT | 304,000,000 |
| | KALIMANTAN TENGAH | 325,000,000 |
| | KALIMANTAN SELATAN | 309,000,000 |
| | KALIMANTAN TIMUR | 327,000,000 |
| | SELAWESI UTARA | 338,000,000 |
| | GORONTALO | 339,000,000 |
| | SELAWESI BARAT | 333,000,000 |
| | SULAWESI SELATAN | 304,000,000 |
| | SELAWESI TENGAH | 328,000,000 |
| | SELAWESI TENGGARA | 334,000,000 |
| | MALUKU | 338,000,000 |
| | MALUKU UTARA | 309,000,000 |
| | P A P U A | 345,000,000 |
| | IRIAN JAYA BARAT | 367,000,000 |
| | | 326,000,000 |

Keterangan :

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II.

38 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2
OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | RODA 2 | TRAIL |
|-----|--------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 26,000,000 | 28,000,000 |
| 3. | R I A U | 24,000,000 | 25,000,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 23,000,000 | 26,000,000 |
| 5. | J A M B I | 24,000,000 | 26,000,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 25,000,000 | 26,000,000 |
| 8. | LAMPUNG | 26,000,000 | 27,000,000 |
| 9. | BENKULU | 24,000,000 | 27,000,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 26,000,000 | 29,000,000 |
| 11. | BANTEN | 22,000,000 | 25,000,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 23,000,000 | 25,000,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 22,000,000 | 25,000,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 25,000,000 | 27,000,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 24,000,000 | 26,000,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 25,000,000 | 26,000,000 |
| 17. | B A L I | 25,000,000 | 27,000,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 26,000,000 | 29,000,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 24,000,000 | 28,000,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 25,000,000 | 27,000,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 27,000,000 | 29,000,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 26,000,000 | 27,000,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 24,000,000 | 29,000,000 |
| 25. | GORONTALO | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 27,000,000 | 28,000,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 26,000,000 | 29,000,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 28,000,000 | 30,000,000 |
| 30. | MALUKU | 27,000,000 | 28,000,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 27,000,000 | 29,000,000 |
| 32. | P A P U A | 30,000,000 | 38,000,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 28,000,000 | 34,000,000 |

Keterangan :

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

39 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL
KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN (RODA 4)

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | RODA 4/PICK UP | RODA 4/MINIBUS | RODA 4/ DOUBLE GARDAN |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 154,000,000 | 247,000,000 | 378,000,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 159,000,000 | 269,000,000 | 388,000,000 |
| 3. | R I A U | 156,000,000 | 250,000,000 | 365,000,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 153,000,000 | 244,000,000 | 374,000,000 |
| 5. | J A M B I | 162,000,000 | 288,000,000 | 387,000,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 158,000,000 | 253,000,000 | 376,000,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 154,000,000 | 251,000,000 | 383,000,000 |
| 8. | LAMPUNG | 164,000,000 | 276,000,000 | 423,000,000 |
| 9. | BENGKULU | 160,000,000 | 262,000,000 | 398,000,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 176,000,000 | 268,000,000 | 403,000,000 |
| 11. | BANTEN | 153,000,000 | 246,000,000 | 376,000,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 162,000,000 | 254,000,000 | 383,000,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 156,000,000 | 245,000,000 | 379,000,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 156,000,000 | 256,000,000 | 382,000,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 153,000,000 | 251,000,000 | 378,000,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 148,000,000 | 243,000,000 | 369,000,000 |
| 17. | B A L I | 150,000,000 | 256,000,000 | 380,000,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 174,000,000 | 270,000,000 | 423,000,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 165,000,000 | 270,000,000 | 406,000,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 169,000,000 | 269,000,000 | 407,000,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 157,000,000 | 256,000,000 | 364,000,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 171,000,000 | 263,000,000 | 366,000,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 166,000,000 | 263,000,000 | 406,000,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 173,000,000 | 260,000,000 | 417,000,000 |
| 25. | GORONTALO | 171,000,000 | 274,000,000 | 417,000,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 160,000,000 | 263,000,000 | 392,000,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 164,000,000 | 265,000,000 | 403,000,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 161,000,000 | 265,000,000 | 400,000,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 168,000,000 | 263,000,000 | 418,000,000 |
| 30. | MALUKU | 154,000,000 | 262,000,000 | 397,000,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 160,000,000 | 277,000,000 | 421,000,000 |
| 32. | P A P U A | 174,000,000 | 292,000,000 | 444,000,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 158,000,000 | 265,000,000 | 404,000,000 |

Keterangan :

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

25 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL/BUS

| NO. | URAIAN | BIAYA TA. 2012 | KET |
|-----|----------------------------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | RODA 6 DAN/ATAU BUS SEDANG | 493,000,000 | |
| 2. | RODA 6 DAN/ATAU BUS BESAR | 998,000,000 | |

Keterangan :

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput pegawai

40 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | MENTERI DAN SETINGKAT MENTERI | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------|----------|------------|
| | | HALFDAY | FULL DAY | FULL BOARD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 260,000 | 435,000 | 860,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 270,000 | 540,000 | 1,350,000 |
| 3. | R I A U | 260,000 | 350,000 | 930,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 260,000 | 420,000 | 930,000 |
| 5. | J A M B I | 260,000 | 370,000 | 800,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 260,000 | 370,000 | 825,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 260,000 | 380,000 | 800,000 |
| 8. | LAMPUNG | 260,000 | 350,000 | 760,000 |
| 9. | BENGKULU | 240,000 | 350,000 | 800,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 290,000 | 350,000 | 930,000 |
| 11. | BANTEN | 310,000 | 415,000 | 1,040,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 310,000 | 360,000 | 1,160,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 350,000 | 500,000 | 2,100,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 250,000 | 305,000 | 1,020,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 275,000 | 435,000 | 1,020,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 310,000 | 420,000 | 1,300,000 |
| 17. | B A L I | 400,000 | 510,000 | 1,870,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 330,000 | 545,000 | 1,025,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 250,000 | 450,000 | 960,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 220,000 | 350,000 | 930,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 200,000 | 350,000 | 930,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 220,000 | 350,000 | 930,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 300,000 | 450,000 | 930,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 240,000 | 425,000 | 930,000 |
| 25. | GORONTALO | 240,000 | 400,000 | 910,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 240,000 | 400,000 | 910,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 240,000 | 400,000 | 1,240,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 240,000 | 400,000 | 910,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 240,000 | 400,000 | 930,000 |
| 30. | MALUKU | 310,000 | 450,000 | 910,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 310,000 | 450,000 | 910,000 |
| 32. | P A P U A | 300,000 | 450,000 | 1,120,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 310,000 | 450,000 | 910,000 |

41 PEJABAT ESELON I DAN II

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | PEJABAT ESELON I DAN II | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|----------|------------|
| | | HALFDAY | FULL DAY | FULL BOARD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 205,000 | 395,000 | 840,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 185,000 | 300,000 | 800,000 |
| 3. | R I A U | 190,000 | 280,000 | 640,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 200,000 | 290,000 | 690,000 |
| 5. | J A M B I | 190,000 | 280,000 | 740,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 170,000 | 235,000 | 820,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 210,000 | 310,000 | 645,000 |
| 8. | LAMPUNG | 180,000 | 280,000 | 725,000 |
| 9. | BENGKULU | 190,000 | 280,000 | 770,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 265,000 | 325,000 | 620,000 |
| 11. | BANTEN | 280,000 | 340,000 | 820,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 260,000 | 340,000 | 760,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 280,000 | 400,000 | 740,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 170,000 | 280,000 | 740,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 245,000 | 405,000 | 740,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 250,000 | 340,000 | 670,000 |
| 17. | B A L I | 350,000 | 490,000 | 1,640,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 270,000 | 350,000 | 785,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 230,000 | 350,000 | 740,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 155,000 | 250,000 | 600,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 180,000 | 335,000 | 600,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 190,000 | 290,000 | 815,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 220,000 | 370,000 | 750,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 190,000 | 340,000 | 790,000 |
| 25. | GORONTALO | 190,000 | 270,000 | 830,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 210,000 | 320,000 | 690,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 190,000 | 355,000 | 1,000,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 190,000 | 320,000 | 810,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 210,000 | 320,000 | 675,000 |
| 30. | MALUKU | 230,000 | 340,000 | 815,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 250,000 | 380,000 | 730,000 |
| 32. | P A P U A | 225,000 | 280,000 | 700,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 230,000 | 340,000 | 700,000 |

42 PEJABAT ESELON III KE BAWAH

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | PEJABAT ESELON III KE BAWAH | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | HALFDAY | FULL DAY | FULL BOARD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 180,000 | 270,000 | 650,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 160,000 | 275,000 | 540,000 |
| 3. | R I A U | 130,000 | 185,000 | 485,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 140,000 | 240,000 | 470,000 |
| 5. | J A M B I | 175,000 | 235,000 | 465,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 145,000 | 220,000 | 445,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 165,000 | 190,000 | 435,000 |
| 8. | LAMPUNG | 135,000 | 205,000 | 640,000 |
| 9. | BENGKULU | 125,000 | 170,000 | 705,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 210,000 | 295,000 | 445,000 |
| 11. | BANTEN | 170,000 | 230,000 | 570,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 155,000 | 260,000 | 645,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 230,000 | 330,000 | 630,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 130,000 | 210,000 | 540,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 175,000 | 280,000 | 540,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 200,000 | 280,000 | 530,000 |
| 17. | B A L I | 230,000 | 395,000 | 1,000,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 240,000 | 325,000 | 605,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 185,000 | 305,000 | 480,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 140,000 | 205,000 | 415,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 170,000 | 280,000 | 480,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 175,000 | 250,000 | 665,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 200,000 | 335,000 | 595,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 150,000 | 240,000 | 655,000 |
| 25. | GORONTALO | 155,000 | 235,000 | 755,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 140,000 | 280,000 | 465,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 160,000 | 310,000 | 825,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 150,000 | 250,000 | 415,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 150,000 | 270,000 | 480,000 |
| 30. | MALUKU | 110,000 | 240,000 | 540,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 110,000 | 150,000 | 535,000 |
| 32. | P A P U A | 155,000 | 190,000 | 630,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 205,000 | 305,000 | 550,000 |

43 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

| NO. | PROPINSI | TARIF HOTEL KELAS SUITE | TARIF HOTEL KELAS NON SUITE | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | BINTANG LIMA | BINTANG EMPAT | BINTANG TIGA | BINTANG DUA | BINTANG SATU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 4,420,000 | 1,760,000 | 1,300,000 | 1,080,000 | 410,000 | 340,000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 4,960,000 | 1,480,000 | 1,000,000 | 650,000 | 470,000 | 310,000 |
| 3. | R I A U | 3,450,000 | 1,850,000 | 960,000 | 720,000 | 450,000 | 380,000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 3,410,000 | 1,500,000 | 930,000 | 650,000 | 380,000 | 280,000 |
| 5. | J A M B I | 4,000,000 | 1,130,000 | 1,030,000 | 560,000 | 370,000 | 290,000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 4,240,000 | 1,750,000 | 1,030,000 | 800,000 | 460,000 | 280,000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 4,500,000 | 1,360,000 | 1,000,000 | 550,000 | 400,000 | 280,000 |
| 8. | LAMPUNG | 3,300,000 | 1,700,000 | 960,000 | 770,000 | 340,000 | 320,000 |
| 9. | BENGGULU | 1,300,000 | 920,000 | 790,000 | 580,000 | 570,000 | 510,000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 2,000,000 | 1,100,000 | 1,030,000 | 500,000 | 410,000 | 300,000 |
| 11. | BANTEN | 3,250,000 | 1,670,000 | 1,430,000 | 920,000 | 450,000 | 320,000 |
| 12. | JAWA BARAT | 3,250,000 | 1,650,000 | 1,470,000 | 830,000 | 460,000 | 390,000 |
| 13. | D. K.I. JAKARTA | 8,720,000 | 1,650,000 | 1,000,000 | 650,000 | 610,000 | 400,000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 4,050,000 | 1,650,000 | 1,210,000 | 750,000 | 450,000 | 350,000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 4,620,000 | 1,440,000 | 1,040,000 | 670,000 | 520,000 | 320,000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 4,400,000 | 1,790,000 | 960,000 | 640,000 | 390,000 | 280,000 |
| 17. | B A L I | 4,510,000 | 2,280,000 | 1,810,000 | 1,100,000 | 820,000 | 550,000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 3,050,000 | 1,270,000 | 1,000,000 | 550,000 | 540,000 | 360,000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 3,000,000 | 1,160,000 | 1,000,000 | 610,000 | 470,000 | 400,000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 2,400,000 | 1,400,000 | 1,130,000 | 740,000 | 430,000 | 300,000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 3,000,000 | 1,490,000 | 1,350,000 | 750,000 | 400,000 | 340,000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 4,250,000 | 1,560,000 | 1,420,000 | 770,000 | 500,000 | 350,000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 4,000,000 | 1,500,000 | 1,230,000 | 750,000 | 550,000 | 450,000 |
| 24. | SELAWESI UTARA | 3,200,000 | 1,540,000 | 1,240,000 | 640,000 | 500,000 | 290,000 |
| 25. | GORONTALO | 1,320,000 | 1,030,000 | 1,010,000 | 910,000 | 410,000 | 240,000 |
| 26. | SELAWESI BARAT | 1,260,000 | 1,140,000 | 1,030,000 | 910,000 | 400,000 | 360,000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 4,820,000 | 1,650,000 | 1,000,000 | 800,000 | 420,000 | 330,000 |
| 28. | SELAWESI TENGAH | 2,030,000 | 1,210,000 | 1,040,000 | 510,000 | 400,000 | 330,000 |
| 29. | SELAWESI TENGGARA | 1,850,000 | 1,200,000 | 1,070,000 | 620,000 | 450,000 | 420,000 |
| 30. | MALUKU | 3,000,000 | 1,200,000 | 1,030,000 | 680,000 | 390,000 | 280,000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 3,110,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 600,000 | 420,000 | 380,000 |
| 32. | P A P U A | 2,850,000 | 1,600,000 | 1,050,000 | 720,000 | 460,000 | 380,000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 4,500,000 | 1,580,000 | 1,060,000 | 900,000 | 400,000 | 370,000 |

Keterangan :

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA-KL). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran);
- b. Peruntukan hotel berbintang :
 1. Hotel Bintang Empat : Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat negara lainnya yang setara, pejabat eselon I serta pejabat eselon II.
 2. Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon III/Golongan IV.
 3. Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV/Golongan III.
 4. Hotel Bintang Satu : Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.
- d. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Kode dan Nama Satuar. Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan.....*) diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

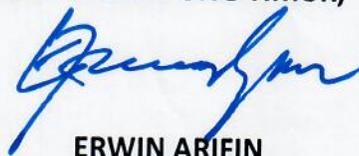
Sukadana,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

NIP.

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Masukan

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| 1. | SEKDAKAB. <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | ASS. I <input type="checkbox"/> |
| 3. | ASS. II <input type="checkbox"/> |
| 4. | ASS. III <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. | Kadis <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. | BAG. HKM <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | <input type="checkbox"/> |
| 8. | <input type="checkbox"/> |

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN